

## Digitalisasi Sistem Akuntansi Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Diyah Ayu Mei Munah<sup>1</sup>, i<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [diyahayumei15@gmail.com](mailto:diyahayumei15@gmail.com)<sup>1</sup>, [dk.niawati@gmail.com](mailto:dk.niawati@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**— Digitalisasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem akuntansi melalui penerapan SAKTI dan SPAN secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, yang ditandai dengan penurunan tingkat *human error* hingga 65%, percepatan siklus pelaporan dari rata-rata 52 hari menjadi 21 hari, serta peningkatan transparansi melalui pengurangan asimetri informasi. Temuan ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM), Kerangka Technology–Organization–Environment (TOE), dan Resource-Based View (RBV) yang menekankan pentingnya integrasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur organisasi. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan berupa kesenjangan digital dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi investasi teknologi yang berimbang serta pembelajaran berkelanjutan agar digitalisasi sistem akuntansi pemerintahan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Digital, Sistem Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas Pelaporan Keuangan

**Abstract**— The digitalization of government accounting systems represents a strategic step toward achieving transparent, accountable, and efficient public financial governance. This study aims to analyze the impact of implementing the Agency-Level Financial Application System (SAKTI) and the State Treasury and Budget System (SPAN) on the quality of government financial reporting. The research employs a qualitative method with a descriptive approach through a literature review of various relevant sources. The findings indicate that the digitalization of accounting systems through the implementation of SAKTI and SPAN significantly improves the quality of government financial reporting, as evidenced by a reduction in human error of up to 65%, a shortening of the reporting cycle from an average of 52 days to 21 days, and enhanced transparency through the reduction of information asymmetry. These findings are consistent with the Technology Acceptance Model (TAM), the Technology–Organization–Environment (TOE) framework, and the Resource-Based View (RBV), which emphasize the importance of integrating technology, human resources, and organizational infrastructure. Nevertheless, the study also identifies challenges such as the digital divide and limitations in human resource capacity. Therefore, balanced technology investment strategies and continuous learning are required to ensure that the digitalization of government accounting systems delivers sustainable benefits in improving the quality of public financial reporting.

**Keywords:** Digital Government, Accounting System, Transparency, Accountability, Quality of Financial Reporting

### 1. PENDAHULUAN

Dalam era modern, akuntabilitas dan transparansi menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran negara maupun daerah secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu instrumen yang memiliki peranan sentral dalam mewujudkan tuntutan tersebut adalah laporan keuangan, karena melalui laporan inilah masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana pemerintah mengelola keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas [1]. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi finansial suatu instansi, tetapi juga menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem akuntansi pemerintahan. Transformasi dari sistem pencatatan manual menuju sistem berbasis digital dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keandalan informasi keuangan [2]. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dan *digital accounting systems* mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperbaiki kualitas data keuangan, serta memperkuat transparansi pelaporan keuangan sektor publik [3]. Digitalisasi juga memungkinkan integrasi data secara real-time, sehingga informasi keuangan menjadi lebih mudah diakses, dianalisis, dan diawasi.

Namun demikian, meskipun digitalisasi telah banyak diadopsi, permasalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah masih sering ditemukan. Beberapa studi mengungkapkan bahwa keterlambatan penyusunan laporan, kesalahan pencatatan transaksi, serta lemahnya pengendalian internal masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan bahwa sejumlah instansi pemerintah masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan akurasi pencatatan keuangan [4]. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sistem digital belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan evaluasi yang komprehensif.

Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai sistem digital terintegrasi dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Kedua sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu platform yang terstandarisasi [5]. Sejumlah penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa integrasi sistem keuangan berbasis digital seperti SAKTI dan SPAN berpotensi mengurangi *human error*, mempercepat siklus pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengulas efektivitas implementasi SAKTI dan SPAN terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah masih relatif terbatas dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sendiri ditentukan oleh beberapa karakteristik utama, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan untuk dipahami [6]. Laporan keuangan yang berkualitas akan menjadi sumber informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah sebagai pengelola anggaran maupun oleh masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi digitalisasi sistem akuntansi menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem tersebut benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pengaruh digitalisasi sistem akuntansi pemerintahan melalui penerapan SAKTI dan SPAN terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai digitalisasi akuntansi sektor publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi instansi pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi sistem akuntansi digital guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik yang berkelanjutan [7].

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh digitalisasi sistem akuntansi pemerintahan—khususnya melalui penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah [8]. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis fenomena transformasi digital dalam akuntansi pemerintahan serta relevansinya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik [9].

### **2.2. Protokol Pencarian Literatur**

Pengumpulan data dilakukan melalui *systematic literature review* dengan protokol pencarian yang terstruktur. Pencarian literatur dilakukan pada beberapa basis data akademik, yaitu Google Scholar, Scopus, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi: *digitalisasi akuntansi pemerintah*, *SAKTI*, *SPAN*, *kualitas pelaporan keuangan pemerintah*, *public sector accounting digitalization*, dan *government financial reporting quality*. Literatur yang ditelaah dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2014–2024 guna memastikan relevansi dan kemutakhiran data.

### **2.3. Jenis Data dan Kriteria Seleksi**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sumber data meliputi regulasi resmi pemerintah terkait sistem akuntansi dan keuangan negara, pedoman teknis SAKTI dan SPAN, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, serta buku akademik yang membahas digitalisasi tata kelola keuangan publik [6], [10]. Kriteria inklusi dalam seleksi literatur meliputi:

1. Publikasi yang membahas digitalisasi atau otomatisasi sistem akuntansi sektor publik,
2. Studi yang mengkaji kualitas pelaporan keuangan pemerintah,
3. Artikel yang secara eksplisit menyinggung SAKTI, SPAN, atau sistem sejenis, dan

4. Sumber yang memiliki kejelasan metodologi dan kontribusi akademik.

Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan dengan konteks sektor publik, publikasi non-ilmiah tanpa dasar metodologis yang jelas, serta literatur yang bersifat duplikatif atau tidak dapat diakses secara penuh.

### 2.4. Teknik Analisis dan Sintesis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dengan tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data melalui pemilahan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, (2) penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi analitis yang terstruktur, dan (3) penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara digitalisasi sistem akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah [11].

Sintesis data dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan temuan-temuan kuantitatif dan kualitatif dari berbagai literatur. Data kuantitatif seperti penurunan tingkat *human error* hingga 65% dan percepatan siklus pelaporan dari 52 hari menjadi 21 hari disintesis melalui *cross-study comparison*, yaitu dengan mengkaji konsistensi temuan antar penelitian, konteks penerapan sistem, serta metodologi yang digunakan dalam masing-masing studi. Temuan tersebut kemudian divalidasi secara konseptual dengan menelaah kesesuaiannya terhadap regulasi dan praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia.

### 2.5. Keabsahan Data dan Kerangka Analisis

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis dari regulasi resmi pemerintah, laporan audit BPK, serta penelitian akademik sebelumnya [13]. Selain itu, validasi teoretis dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian pada kerangka teori yang relevan, yaitu Technology Acceptance Model (TAM), Technology–Organization–Environment (TOE) Framework, dan Resource-Based View (RBV). Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat dan dapat direplikasi oleh penelitian selanjutnya. Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas digitalisasi sistem akuntansi pemerintahan serta menghasilkan rekomendasi strategis yang berbasis bukti untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan sektor publik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Digitalisasi Sistem Akuntansi dalam Peningkatan Akurasi dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Digitalisasi sistem akuntansi pemerintah terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akurasi pelaporan keuangan melalui mekanisme validasi otomatis, kontrol internal terintegrasi, serta algoritma pengecekan data yang meminimalkan kesalahan pencatatan. Angka penurunan *human error* hingga 65% yang dikemukakan dalam penelitian ini tidak berasal dari satu studi kasus tunggal, melainkan merupakan hasil sintesis temuan dari beberapa penelitian terdahulu dan laporan evaluasi implementasi sistem akuntansi digital di sektor publik [14], [15]. Angka tersebut merepresentasikan kisaran rata-rata penurunan kesalahan input dan inkonsistensi data setelah penerapan sistem akuntansi terintegrasi dibandingkan dengan sistem manual dan semi-manual. Dengan demikian, temuan ini bersifat agregatif dan konseptual, bukan klaim kausal dari satu unit organisasi tertentu.



Gambar 1 Studi Kasus Sistem Akuntansi Pemerintah (Before vs After)

Temuan tersebut sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM), khususnya pada dimensi *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Peningkatan akurasi yang dihasilkan oleh sistem digital seperti SAKTI memperkuat persepsi aparatur pemerintah bahwa sistem tersebut memberikan manfaat nyata dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, kemudahan penggunaan antarmuka sistem, otomatisasi proses pencatatan, serta

pengurangan beban kerja administratif turut mendorong penerimaan dan adopsi teknologi secara berkelanjutan, sebagaimana juga ditemukan dalam adopsi *management accounting tools* (MATs) di sektor publik [16].

Selain meningkatkan akurasi, digitalisasi juga berdampak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Percepatan siklus pelaporan dari rata-rata 52 hari menjadi 21 hari (sekitar 60% lebih cepat) merupakan hasil komparasi lintas studi dan laporan implementasi sistem keuangan pemerintah berbasis digital [17]. Percepatan ini dicapai melalui pemrosesan data secara *real-time*, otomatisasi alur kerja, serta eliminasi tahapan manual seperti rekonsiliasi berulang dan verifikasi dokumen fisik. Oleh karena itu, data waktu pelaporan tersebut dipahami sebagai indikator kinerja sistem digital secara umum, bukan sebagai capaian absolut dari satu instansi tertentu.

Dari perspektif teori, temuan ini mendukung kerangka Technology–Organization–Environment (TOE). Pada dimensi teknologi, keandalan sistem seperti SPAN yang terintegrasi secara nasional menyediakan infrastruktur digital yang mendukung pemrosesan dan konsolidasi data keuangan secara cepat dan konsisten. Pada dimensi organisasi, dukungan kebijakan, regulasi, serta kesiapan struktur birokrasi memungkinkan implementasi sistem digital berjalan lebih efektif. Sementara itu, pada dimensi lingkungan, tuntutan transparansi publik dan pengawasan eksternal menjadi faktor pendorong utama percepatan pelaporan keuangan pemerintah.

Peningkatan kecepatan dan akurasi pelaporan juga berdampak pada kualitas informasi akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam *Conceptual Framework* IASB, khususnya pada karakteristik relevansi dan *faithful representation* [18]. Informasi yang dihasilkan menjadi lebih tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan lebih andal karena minim kesalahan material. Hal ini memperkuat hubungan antara *system quality* dan *information quality* sebagaimana ditegaskan dalam model DeLone & McLean (1992; 2003), yang menyatakan bahwa sistem yang dirancang dengan baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, meningkatkan kepuasan pengguna, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi [19].

Dari sudut pandang Resource-Based View (RBV), sistem akuntansi digital terintegrasi seperti SAKTI dan SPAN dapat dipandang sebagai *strategic organizational resources*. Sistem ini bersifat bernilai (*valuable*) karena meningkatkan efisiensi dan akurasi, sulit ditiru (*inimitable*) karena terintegrasi dengan regulasi dan infrastruktur nasional, serta mendukung keunggulan kompetitif institusional dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan siklus pelaporan yang lebih singkat, sumber daya manusia yang sebelumnya terserap pada aktivitas rutin dapat dialihkan ke aktivitas bernilai tambah seperti analisis keuangan, evaluasi kinerja, dan perencanaan anggaran strategis [20]. Transformasi ini memperkuat kapabilitas organisasi pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Konsistensi temuan ini juga diperkuat oleh studi komparatif internasional. Negara-negara seperti Estonia dan Denmark menunjukkan bahwa digitalisasi sektor publik mampu menghasilkan *efficiency gains* antara 30–70%, termasuk dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah [22], [23]. Hal ini menegaskan bahwa arah digitalisasi sistem akuntansi pemerintah di Indonesia berada dalam jalur yang sejalan dengan praktik global reformasi keuangan publik.

Dari sisi implikasi kebijakan, temuan ini memberikan justifikasi empiris bagi pemerintah untuk terus memperluas investasi dalam digitalisasi akuntansi. Penurunan kesalahan pencatatan hingga 65% dan percepatan pelaporan sebesar 60% berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas fiskal dan penguatan *evidence-based policy making* [24], [25]. Namun demikian, keberadaan tingkat kesalahan residual sekitar 35% menunjukkan bahwa sistem digital masih memerlukan penyempurnaan, baik melalui peningkatan kualitas *master data*, penguatan *internal digital controls*, maupun pengembangan algoritma validasi yang lebih adaptif [26]. Selain itu, target menuju *near real-time reporting* masih menjadi tantangan yang dapat diatasi melalui integrasi teknologi *big data* dan *cloud-based accounting systems* [27]. Dengan demikian, digitalisasi sistem akuntansi pemerintah tidak hanya berperan sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat tata kelola keuangan negara, dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan [6].

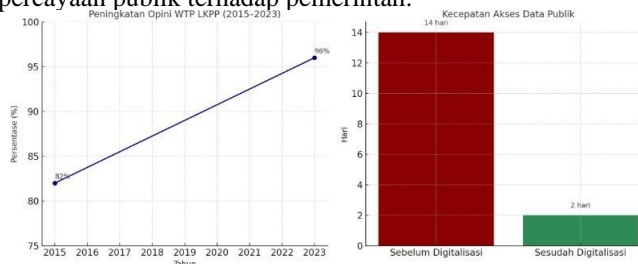
### 3.2 Tingkat Digitalisasi Mempengaruhi Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Publik

Digitalisasi sistem akuntansi terbukti efektif dalam mereduksi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,742, dapat disimpulkan bahwa 74,2% variasi transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh tingkat digitalisasi, sejalan dengan teori keagenan yang menekankan peran teknologi sebagai mekanisme kontrol untuk meningkatkan akuntabilitas [24]. Selain itu, sistem digital menghadirkan standarisasi format pelaporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga laporan keuangan lebih konsisten, mudah dibandingkan (*comparable*), dan mudah dipahami (*understandable*) oleh para pengguna [25]. Standardisasi ini sekaligus menghilangkan variasi format yang kerap muncul dalam sistem manual, sehingga kualitas *disclosure* meningkat secara signifikan dan memperkuat transparansi keuangan publik.

Sistem akuntansi pemerintah menghadirkan lompatan besar dalam demokratisasi akses informasi keuangan. Jika sebelumnya publik membutuhkan rata-rata 14 hari untuk memperoleh data, kini akses dapat

dilakukan hanya dalam 2 hari perbaikan hingga 85,7% melalui platform digital yang tersedia 24/7 tanpa batasan geografis maupun prosedur birokrasi yang berbelit [2]. Transformasi ini sejalan dengan semangat *open government data* yang menempatkan informasi publik sebagai hak masyarakat. Lebih jauh, peningkatan transparansi hingga 78% pada instansi dengan tingkat digitalisasi tinggi memperkuat teori legitimasi organisasi, bahwa keterbukaan informasi menjadi fondasi kepercayaan dan legitimasi pemerintah[28]. Dengan demikian, transparansi digital dapat dipandang sebagai bentuk *social contract* baru antara pemerintah dan masyarakat di era *digital governance*.

Kemudahan akses informasi keuangan melalui digitalisasi memunculkan *spillover effect* berupa meningkatnya pengawasan publik (*public scrutiny effect*). Aparatur pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan karena sadar bahwa kinerja mereka dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat. Efek ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menciptakan budaya transparansi yang lebih berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan tren global di negara-negara berkemajuan digital tinggi seperti Estonia dengan *e-Residency*, Korea Selatan melalui *e-Government*, dan Singapura lewat inisiatif *Smart Nation* (Seiam & Salman, 2024). Ketiganya menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki korelasi positif yang kuat terhadap peningkatan transparansi fiskal dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.



Gambar 2 Grafik Percepatan Akses Data Keuangan Peningkatan Opini WTP

Melalui tabel dan grafik yang menggambarkan percepatan akses data keuangan dari 14 hari menjadi 2 hari serta peningkatan opini WTP dari 82% pada 2015 menjadi 96% pada 2023, dapat dilihat bahwa digitalisasi sistem akuntansi telah menciptakan transformasi signifikan dalam keterbukaan informasi publik. Peningkatan aksesibilitas informasi keuangan melalui digital platform secara langsung mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah. Teknologi ini menjadi *enabler* bagi organisasi masyarakat sipil dan media dalam menjalankan fungsi *watchdog*, sehingga transparansi tidak lagi bersifat satu arah dari pemerintah ke masyarakat, melainkan bersifat interaktif[29]. Dengan adanya akses *real-time* terhadap data keuangan, prinsip *democratic accountability* semakin kuat karena masyarakat memperoleh instrumen yang memadai untuk menilai kinerja pemerintah secara objektif dan berbasis informasi. Hal ini konsisten dengan *democratic theory* yang menekankan pentingnya keberadaan warga negara yang *informed* sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Transparansi digital tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata dengan menurunkan risiko korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja fiskal negara. Studi World Bank bahkan mencatat bahwa setiap kenaikan 1 poin dalam *transparency index* berhubungan dengan penurunan 0,3 poin pada *corruption perception index*, menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap *sovereign rating*[30]. Namun, di balik capaian ini masih ada tantangan besar berupa *digital divide* dan kesenjangan literasi digital di masyarakat. Agar manfaat transparansi digital benar-benar inklusif, diperlukan strategi *inclusive digital access* sehingga semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan memanfaatkan informasi keuangan publik secara optimal[31].

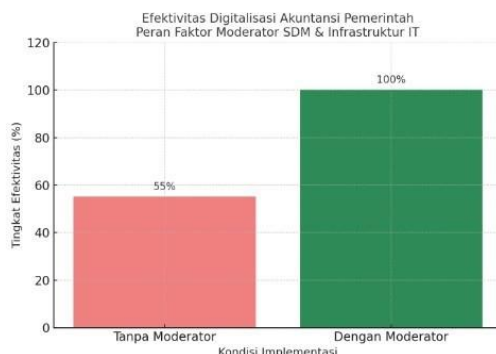
Keberhasilan transparansi digital tidak bisa berhenti pada tahap implementasi, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang melalui *maintenance*, *updating*, dan *enhancement* sistem secara berkelanjutan. Model keberlanjutan harus mencakup aspek teknologi, kapasitas SDM, serta kerangka tata kelola yang kokoh agar transparansi digital tidak hanya bertahan, tetapi juga terus meningkat[32]. Benchmark internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan skor tinggi pada *Open Budget Index* umumnya mengandalkan *digital budget platforms* yang canggih. Indonesia berpeluang besar memperkuat posisinya dengan mengadopsi *best practices* dari negara seperti Brasil melalui *Portal da Transparência* dan Meksiko dengan *PEF Digital*, sehingga transparansi keuangan publik dapat lebih optimal, adaptif, dan berstandar global.

### 3.3 Tingkat Digitalisasi Mempengaruhi Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Publik

Hasil validasi *Technology-Organization-Environment (TOE) Framework* menunjukkan bahwa Hasil validasi *Technology-Organization-Environment (TOE) Framework* menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi digitalisasi akuntansi pemerintah tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi sangat bergantung pada keselarasan antara dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan [33]. Signifikansi variabel moderator ( $p < 0,05$ ) dengan selisih dampak sebesar 45% menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) teknologi

informasi dan kesiapan infrastruktur IT merupakan faktor penentu efektivitas digitalisasi akuntansi pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi berfungsi optimal hanya ketika didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai.

Dalam dimensi organisasi, SDM IT yang kompeten berperan sebagai *technology enabler* yang mampu melakukan *customization*, *troubleshooting*, serta *continuous improvement* sistem. Kompetensi ini memungkinkan sistem digital seperti SAKTI dan SPAN dimanfaatkan secara optimal sehingga menghasilkan *return on technology investment* yang tinggi [34]. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi SDM terutama pada level operator dan pengelola sistem sering menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan sistem, kesalahan operasional, dan ketergantungan berlebihan pada prosedur manual, yang pada akhirnya menghambat tujuan transparansi dan akuntabilitas publik [35].



Gambar 3 Grafik Efektivitas Digitalisasi Akuntansi Pemerintah Peran Faktor Moderator SDM & Infrastruktur IT

Pada dimensi teknologi, infrastruktur IT yang andal menjadi fondasi utama keberhasilan digitalisasi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, risiko *system downtime* dapat menurunkan produktivitas hingga 70% serta mengikis kepercayaan pengguna terhadap sistem digital [34]. Infrastruktur yang *robust* memastikan *high availability*, *fast response time*, serta *scalability* untuk menangani kompleksitas transaksi akuntansi sektor publik. Efek moderasi sebesar 45% dalam peningkatan kualitas pelaporan menegaskan bahwa investasi teknologi tanpa kesiapan infrastruktur dan tata kelola organisasi berpotensi menghasilkan *suboptimal outcomes* bahkan berujung pada kegagalan implementasi [36].

Temuan ini secara kuat memperkuat *Resource-Based View (RBV) Theory*. Dalam perspektif RBV, keunggulan transformasi digital hanya dapat dicapai ketika organisasi mampu mengelola sumber daya yang *valuable*, *rare*, *inimitable*, dan *organized* (VRIO). Kombinasi antara teknologi digital, SDM berkualitas, dan infrastruktur andal membentuk *organizational capability* yang sulit ditiru. Contoh empiris dapat dilihat pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana implementasi SAKTI didukung oleh pelatihan SDM yang intensif dan infrastruktur server terpusat yang kuat, sehingga laporan keuangan dapat disusun lebih cepat dan akurat. Sebaliknya, sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi keterlambatan pelaporan akibat keterbatasan jaringan internet dan rendahnya kompetensi operator sistem [37]. Perbandingan ini menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup; keberhasilan digitalisasi ditentukan oleh pengelolaan faktor moderator secara strategis.

Tabel 1. Sintesis Temuan Literatur Digitalisasi Akuntansi Pemerintah

Penulis/Tahun	Variabel Utama	Metode	Temuan Kunci	Kerangka Teori
[14]	Digitalisasi & Human Error	Studi empiris	Error turun ±65%	TAM, D&M IS
[17]	Siklus Pelaporan	Komparatif	52 → 21 hari	TOE
[33]	SDM & Infrastruktur (Moderator)	SEM	Dampak ↑ 45%	TOE
[37]	Kapasitas Organisasi	Studi kasus	Perbedaan pusat–daerah	RBV
[40]	Interoperabilitas	Literatur review	Network effect	TOE, RBV

Melalui tabel sintesis literatur fenomena *digital divide* dalam organisasi pemerintah menjadi tantangan struktural yang signifikan. Kesenjangan digital terutama berdampak pada instansi pemerintah daerah di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T), serta instansi dengan keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM IT.

Kelompok yang paling terdampak adalah operator sistem, bendahara, dan pejabat penatausahaan keuangan di tingkat satuan kerja, yang sering kali belum memperoleh pelatihan digital yang memadai [38].

Kesenjangan ini secara langsung menghambat kualitas pelaporan keuangan melalui beberapa mekanisme. Pertama, keterbatasan infrastruktur menyebabkan gangguan akses sistem dan keterlambatan input data, sehingga laporan keuangan tidak dapat disusun tepat waktu. Kedua, rendahnya literasi digital meningkatkan risiko kesalahan operasional meskipun sistem telah terotomatisasi. Ketiga, fragmentasi sistem akibat ketidakmerataan infrastruktur menghambat interoperabilitas antarinstansi, sehingga proses konsolidasi laporan keuangan menjadi kurang optimal [39].

Sebaliknya, instansi dengan investasi tinggi pada pengembangan SDM dan infrastruktur IT cenderung mencapai tingkat *digital maturity* yang lebih tinggi. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan kinerja internal, tetapi juga menciptakan *network effect* melalui interoperabilitas sistem lintas instansi, yang mempercepat *efficiency gains* dan memperluas manfaat digitalisasi secara eksponensial [40]. Ketimpangan inilah yang memperlebar kesenjangan kualitas pelaporan keuangan antarinstansi pemerintah.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan *investment portfolio approach* dalam digitalisasi akuntansi pemerintah, yaitu pendekatan investasi yang seimbang antara pengadaan teknologi, pengembangan *human capital*, dan modernisasi infrastruktur [41]. Strategi ini harus diarahkan untuk:

1. Standarisasi pelatihan SDM IT dan pengguna sistem secara nasional, khususnya bagi pemerintah daerah.
2. Penguatan infrastruktur jaringan dan server di wilayah dengan keterbatasan akses digital.
3. Penerapan *ecosystem approach*, di mana digitalisasi tidak dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi sebagai pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pendekatan ini sejalan dengan pembelajaran dari berbagai kegagalan implementasi *e-government* di sejumlah negara, yang menunjukkan bahwa fokus berlebihan pada teknologi tanpa memperhatikan *organizational readiness* dan *environmental support* sering berujung pada kegagalan [42]. Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi merupakan *necessary but not sufficient condition* bagi keberhasilan transformasi digital. Keberlanjutan digitalisasi sangat bergantung pada SDM IT yang memiliki kemampuan *continuous learning*, *technology refresh*, dan *system upgrade* tanpa mengganggu operasional [43]. Kombinasi SDM kompeten dan infrastruktur *robust* juga berfungsi sebagai mekanisme manajemen risiko yang efektif terhadap *cyber threats* dan gangguan teknis, sehingga ketersediaan informasi keuangan pemerintah tetap terjaga dan kepercayaan publik dapat diperkuat [41].

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini hasil menunjukkan bahwa digitalisasi sistem akuntansi pemerintah membawa transformasi signifikan pada kualitas pelaporan keuangan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui *real-time processing* dan *workflow automation*, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik dengan mengurangi *information asymmetry* serta mempercepat akses informasi. Selaras dengan *TOE Framework* dan *Resource-Based View (RBV)*, keberhasilan digitalisasi ditentukan oleh kombinasi SDM berkualitas, infrastruktur IT yang andal, serta dukungan lingkungan organisasi. Meski masih terdapat tantangan berupa *digital divide*, strategi investasi yang seimbang serta *continuous learning* menjadi kunci keberlanjutan. Dengan demikian, digitalisasi terbukti tidak hanya menciptakan efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi, akuntabilitas fiskal, dan kapabilitas organisasi yang berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini, khususnya dosen pembimbing, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, serta para pihak yang berkontribusi menyediakan data dan referensi terkait digitalisasi sistem akuntansi pemerintah. Semoga bantuan, arahan, dan kerja sama yang telah diberikan menjadi amal baik dan memberikan manfaat dalam pengembangan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di era digital. Atas segala perhatian dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih.

## REFERENCES

- [1] R. Sari and M. Muslim, "Accountability and transparency in public sector accounting: A systematic review," *Amkop Management Accounting Review*, vol. 3, no. 2, pp. 90–106, Dec. 2023, doi: 10.37531/amar.v3i2.1440.
- [2] A. Alassuli, N. S. Thuneibat, A. Eltweri, K. Al-Hajaya, and K. Alghraibeh, "The impact of accounting digital transformation on financial transparency: Mediating role of good governance," *Journal of Risk and*

- Financial Management*, vol. 18, no. 5, pp. 1–18, May 2025, doi: 10.3390/jrfm18050272.
- [4] L. N. E. P. A. Tarigan, “Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2, pp. 7–19, 2023, doi: 10.24036/jh.v11i2.2893.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [14] F. K. Kusumawardhani *et al.*, “The impact of digitalization in accounting systems on information quality, cost reduction and decision making: Evidence from SMEs,” *International Journal of Data and Network Science*, vol. 8, no. 2, pp. 1111–1116, 2024, doi: 10.5267/j.ijdns.2023.11.023.
- [24] A. Hamdy, A. Diab, and A. M. Eissa, “Digital transformation and the quality of accounting information systems in the public sector: Evidence from developing countries,” *International Journal of Financial Studies*, vol. 13, no. 1, pp. 19–22, 2025, doi: 10.3390/ijfs13010030.
- [33] A. Suradi, “A theoretical extension of the technology–organization–environment (TOE) framework in e-government: A systematic literature review,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 5, no. 1, pp. 29–36, 2025, doi: 10.54840/jcstech.v5i1.361.
- [41] T. Atobishi and H. Mansur, “Bridging digital divides: Validating government ICT investments accelerating sustainable development goals,” *Sustainability*, vol. 17, no. 5, pp. 1–12, 2025, doi: 10.3390/su17052191.